

BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.690.386.316.763,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.038.035.454,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.638.732.187,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.328.326.875,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.638.732.187,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Pajak restoran Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Pajak hiburan Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan Rp.12.850.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pajak parkir Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- h. Pajak sarang burung walet Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.5.145.956.788,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.6.000.377.025,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah); dan
 - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.88.035.648.374,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.328.326.875,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Rp.27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan pasar Rp.789.298.125,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.467.480.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.326.600.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- f. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.234.537.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - g. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.931.875.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - h. Retribusi terminal Rp.442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - i. Retribusi tempat khusus parkir Rp.72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. Retribusi rumah potong hewan Rp.35.067.500,00 (tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - k. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp.83.868.750,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - l. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan Rp.844.900.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penjualan aset tetap lainnya Rp.186.421.885,00.
 - b. Jasa giro pada kas daerah Rp.4.998.075.133,00.
 - c. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah Rp.9.236.666.667,00.
 - d. Ganti kerugian daerah Rp.34.500.000,00.

- e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain Rp.6.000.000.000,00.
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.120.520.000,00.
 - g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.110.000.000,00.
 - h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa Rp.1.100.000.000,00.
 - i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM) Rp.58.000.000,00.
 - j. Pendapatan BLUD Rp.80.226.792.707,00.
- (5) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.463.348.281.309,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat	Rp. 1.394.043.220.000,00.
------------------	---------------------------
 - b. Pendapatan Transfer

Antar Daerah	Rp. 69.035.061.309,00.
Jumlah Transfer	Rp. 1.463.348.281.309,00.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.394.043.220.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp. 1.216.701.907.000,00.
 - Dana Transfer Umum Rp. 902.452.992.000,00.
 - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 315.114.813.000,00.
 - Dana Alokasi Umum Rp. 587.338.179.000,00.

Dana Tranfer Khusus	Rp.	314.248.915.000,00.
Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp.	133.831.775.000,00.
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp.	180.417.140.000,00.
b. Dana Desa	Rp.	177.341.313.000,00.
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.394.043.220.000,00.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.69.305.061.309,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah) bersumber dari pendapatan bagi hasil dari provinsi.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.700.386.316.763,00 (*satu triliun tujuh ratus miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.127.627.154.629,00 (*satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 646.367.056.730,00. |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 466.144.316.855,00. |
| c. Belanja Hibah | Rp. 15.115.781.044,00 . |

Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.239.413.278.728,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. 7.545.000.000,00. |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 59.549.896.246,00. |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 48.928.385.456,00. |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 115.034.297.026,00. |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 296.000.000,00. |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 8.059.700.000,00. |

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.858.565.300,00 (*Lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.279.487.318.106,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi hasil Rp. 11.896.705.906,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.267.590.612.200,00.

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berupa sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 15

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 17

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

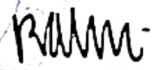
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 27 DESEMBER 2021

BUPATI MUSI RAWAS,


RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 27 DESEMBER 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


EDISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 55

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.038.035.454
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.750.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.750.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.750.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	40.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	40.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	150.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	150.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.850.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.650.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.650.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	200.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	200.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	150.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	150.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	150.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.145.956.788
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.145.956.788
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.145.956.788
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.377.025
4.1.01.15.01	PBBP2	6.000.377.025
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.000.377.025
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.035.648.374
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	88.035.648.374
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	88.035.648.374
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.683.278.125
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	72.600.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	72.600.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.300.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.300.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	789.298.125
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	789.298.125

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	467.480.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	467.480.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	326.600.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	326.600.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.148.750
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	234.537.500
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	10.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	224.537.500
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	931.875.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	931.875.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	442.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	442.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.800.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	72.800.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.067.500
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.067.500
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	83.868.750
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	83.868.750
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	844.900.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	844.900.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	844.900.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.070.976.392
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	186.421.885
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	186.421.885
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	20.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	66.421.885
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	100.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.998.075.133
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.236.666.667
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.236.666.667
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.236.666.667
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	34.500.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	34.500.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	34.500.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.000.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.000.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.520.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.520.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.520.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.268.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	110.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	110.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.100.000.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000.000
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	58.000.000
4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JK M	58.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	80.226.792.707
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	80.226.792.707
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	80.226.792.707
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.216.701.907.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	315.114.813.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	176.723.219.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.193.741.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	238.987.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.866.104.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	66.647.905.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	500.690.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	115.596.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	35.000.000.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.909.745.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	587.338.179.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	587.338.179.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.831.775.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.477.823.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	31.121.703.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.223.626.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.406.731.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.053.790.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.199.104.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.146.272.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.414.590.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	99.802.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	6.036.794.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.150.358.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.653.486.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.834.378.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.236.421.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.593.856.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.829.257.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.038.231.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.315.553.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	180.417.140.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.668.500.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.880.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.834.859.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.645.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.981.721.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.280.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	975.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.939.375.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jamlnan Persalinan	586.207.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.018.648.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.199.854.000
4.2.01.05	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.305.061.309
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.305.061.309
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.942.873.059
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.607.074.306
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.276.100.506
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	169.449.376
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.309.564.062
	Jumlah Pendapatan	1.690.386.316.763
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.127.627.154.629
5.1.01	Belanja Pegawai	646.367.056.730
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	410.769.905.192
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	303.382.300.998
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	287.291.055.598
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.091.245.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.146.462.020
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.891.126.378
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.255.335.642
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.475.506.778
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.338.006.778
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	137.500.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.931.854.303
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.204.129.303
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	727.725.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.513.675.262
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.239.955.262
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	273.720.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.938.582.957
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.912.212.077
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.026.370.880
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.073.787.327
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.021.060.957
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	52.726.370
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.033.956
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.310.919
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	723.037
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.179.591.707
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.743.317.805
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.436.273.902
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.121.574.290
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.000.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	121.574.290
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.287.816.884

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.923.094.015
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	364.722.869
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.706.718.710
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.706.718.710
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.440.492.092
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.958.260.896
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.958.260.896
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.275.393.556
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.275.393.556
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.206.837.640
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.206.837.640
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.746.228.726
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.023.214.473
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	100.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	125.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	560.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	188.452.581
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	264.536.892
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.900.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	169.627.828
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.000.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	43.029.328
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	11.687.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	16.315.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.981.500
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.050.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.820.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	42.245.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.834.859.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	79.834.859.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.981.721.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.981.721.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.645.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.645.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.158.376.085
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.158.376.085
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.356.380.340
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.038.170.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	318.210.340
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	577.050.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	40.650.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	536.400.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.545.917.321

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	267.687.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	267.687.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.622.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.622.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	253.222.200
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	253.222.200
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.964.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.964.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	455.675.325
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	455.675.325
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.669.201.296
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.383.956
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.817.340
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.560.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.372.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.372.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	191.205.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	191.205.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.965.280
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	68.334.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	68.334.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.995.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.995.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	119.181.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	119.181.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.486.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.486.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.516.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.516.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	953.772.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	353.772.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	353.772.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	15.022.823.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	15.022.823.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	15.022.823.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.687.953.119
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	32.687.953.119
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	32.687.953.119
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.144.316.855
5.1.02.01	Belanja Barang	149.229.399.888
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.205.899.888
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	601.510.686
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	431.057.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.558.593.630
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.045.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	115.803.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	40.200.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.300.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.522.237.963
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.398.754.200
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	150.975.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	900.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	150.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.900.756.070
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.136.150.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.024.929.461
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	207.643.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.322.471.050
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	78.311.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	926.008.095
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	82.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.383.850.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.143.897.750
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.959.457.150
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48.810.155.906
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	39.085.592.777
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.963.657.050
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	9.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.932.692.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.289.765.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	296.145.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.030.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	109.400.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	410.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	215.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	167.288.400
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	185.100.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	726.400.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	494.780.700
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	293.642.500
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	23.500.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	23.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	141.121.755.411
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.707.295.849
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.246.000.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.727.350.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	55.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.134.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanlwan	263.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	178.050.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	822.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.660.245.400
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	57.870.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	827.360.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	937.750.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.531.960.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	22.500.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	350.100.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.030.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.391.815.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.331.900.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.489.350.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	691.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.307.900.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.043.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.832.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	102.150.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.100.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	30.100.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.950.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	50.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.239.950.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	105.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	113.750.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	78.932.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	78.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	318.230.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.312.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	265.008.531
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	794.915.876
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.786.183.170
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.492.385.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.593.794.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	46.795.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.076.800.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.879.701.872
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	165.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.876.849.562
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.408.616.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	2.684.932.162
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	28.434.331.800
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	829.129.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	231.016.896
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.823.104
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.971.352.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	209.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	397.800.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.800.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	199.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	352.500.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.500.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.805.852.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	925.300.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	206.500.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	28.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	285.800.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	405.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	41.250.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	41.250.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.899.533.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	135.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	339.057.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	235.000.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	225.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	582.650.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	770.600.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	886.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	126.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	46.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.235.562.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	134.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	451.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.620.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	81.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	32.664.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.355.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	255.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.060.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.040.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.345.175.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.286.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.881.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.178.175.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.532.566.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.170.506.500
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	26.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.729.406.500
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	120.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	131.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	105.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	405.000.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	73.400.000
5.1.02.03.02.0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	55.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	210.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	154.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	158.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.260.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	139.260.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.222.800.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.350.000.000
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	500.000.000
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.372.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.559.547.479
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.559.547.479
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.479.547.479
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	80.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.073.550.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.073.550.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	393.550.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.275.000.000
5.1.02.05.01.0007	Belanja Santunan Kematian	3.405.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.767.282.100
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.767.282.100
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.767.282.100
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.860.215.477
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.860.215.477
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.860.215.477
5.1.05	Belanja Hibah	15.115.781.044
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.115.781.044
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.139.781.044
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.139.781.044
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.976.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.976.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	239.413.278.728
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.545.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.545.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.549.896.246
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.984.800.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.713.800.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.700.000.000
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	13.800.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.271.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.271.000.000

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.462.794.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.462.794.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.472.230.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	400.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	750.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.564.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	775.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.475.545.500
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	40.892.500
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.000.000
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	5.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	20.892.500
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.855.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.155.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.700.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.429.798.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	6.200.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	3.600.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.315.553.000
5.2.02.03.03.0014	Belanja Modal Takaran Lainnya	3.600.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	100.845.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	373.105.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	373.105.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	880.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	225.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	372.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.716.748.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	518.991.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	205.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	313.991.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.096.978.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.839.675.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	81.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	59.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	3.463.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.140.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	33.200.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	100.779.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	18.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	72.279.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	899.700.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.500.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	879.200.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	879.200.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.310.275.735
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.278.955.735
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.287.432.735

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	490.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.497.609.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.914.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	31.320.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	31.320.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.131.019.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.200.299.000
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	46.800.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.831.499.000
5.2.02.08.01.0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir	3.000.000
5.2.02.08.01.0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	160.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	159.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	930.720.000
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	615.720.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	315.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.468.592.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	21.153.887.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.978.887.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.175.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	314.705.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	305.965.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.740.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	600.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	600.000.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	600.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.758.394.900
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.758.394.900
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.758.394.900
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.368.922.111
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.368.922.111
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.368.922.111
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.928.385.456
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.838.020.700
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.722.328.400
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.042.346.670
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.886.721.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.059.154.730
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.383.048.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	4.330.538.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.520.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	115.692.300
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	115.692.300
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	2.099.456
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	2.099.456
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	2.099.456
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.088.265.300
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.088.265.300
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.845.765.300
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	242.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.034.297.026
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	100.910.799.000

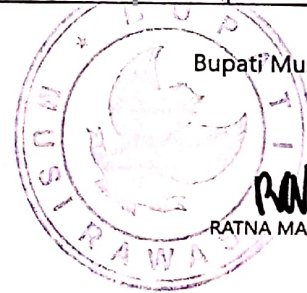
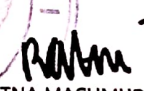
KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	82.060.799.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	54.040.799.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	23.955.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.065.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.850.000.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	450.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	18.400.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.026.500.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.078.500.000
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.000.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.078.500.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.654.000.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.200.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.454.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	150.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	144.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	144.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	528.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	528.000.000
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	528.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.568.998.026
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.690.500.000
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	5.690.500.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	878.498.026
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	878.498.026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	296.000.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	46.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	46.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	46.000.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.059.700.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	8.059.700.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	8.059.700.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	8.059.700.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.858.565.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300
5.4	BELANJA TRANSFER	279.487.318.106
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.896.705.906
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.896.705.906
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.896.705.906
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.590.612.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.590.612.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.590.612.200
	Jumlah Belanja	1.700.386.316.763

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000

Bupati Musi Rawas



 RATNA MACHMUD